



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1477

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan Nya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Dokumen Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025, merupakan penjabaran Renstra Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif, sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapelitbangda Kota Batam dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan, sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam.

Batam, Juli 2024
Kepala Badan Perencanaan dan
Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah

Dahlina Nopilawati, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19751121 200212 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 8

TAHUN 2023 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39

3.3 Program dan Kegiatan 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 55

BAB V PENUTUP 66

5.1 Catatan Penting 66

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 66

5.3 Rencana Tindak Lanjut 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1./ T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam..... 10

Tabel 2.2 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran19

Tabel 2.3 /T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah20

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam.....29

Tabel 2.5 / T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam.....37

Tabel 3.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda Tahun 2025.....39

Tabel 3.2 / T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025, Prakiraan maju Tahun 2026 Kota Batam43

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapelitbangda55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja2

GAMBAR 1.2 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan lainnya3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah dan terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Bapelitbangda Kota Batam melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2025 melalui tahapan-tahapan:

1. Persiapan penyusunan

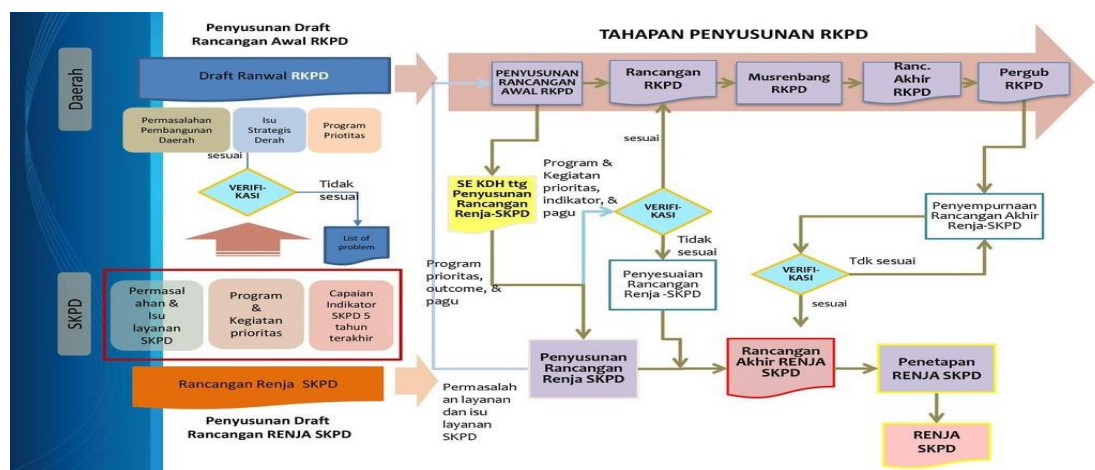
- Pembentukan Tim Penyusunan Renja Bapelitbangda Tahun Anggaran 2025
- Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2023, pengendalian

- kegiatan Tahun 2023 dan Ranwal RKPD 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan bidang, pejabat fungsional perencanaan
 - Desk dengan pengampu kegiatan
 3. Penyusunan rancangan
 - Merupakan penyempurnaan ranwal Renja dengan memperhatikan hasil konsultasi publik Ranwal RKPD 2025
 4. Mengikuti forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Mengikuti forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang melibatkan antara lain: DPRD, PD terkait dan pemangku kepentingan yang terkait
 5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim
 - Verifikasi oleh Mitra PD
 6. Penetapan Renja

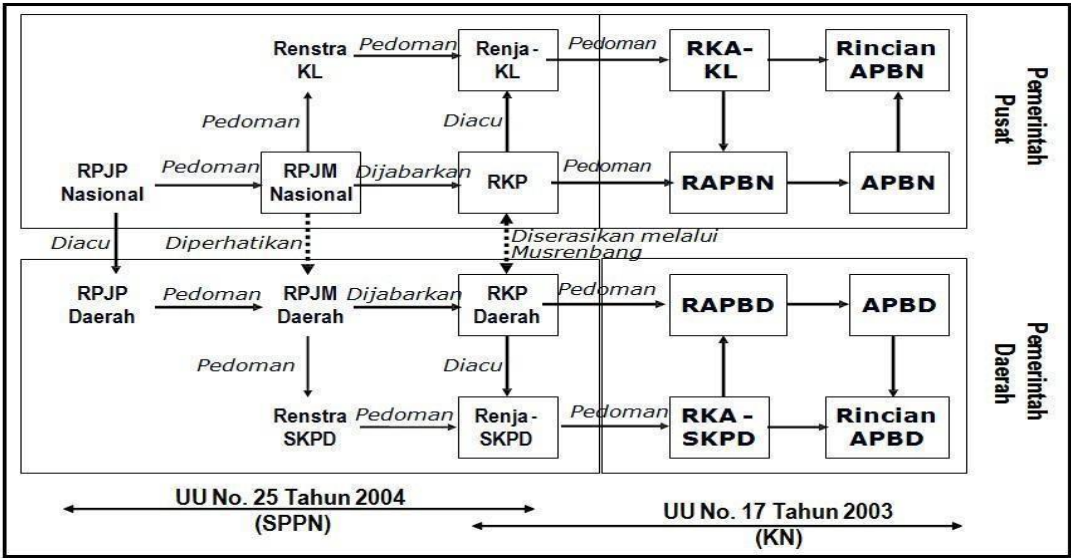
Penyusunan Renja Perangkat Daerah secara simultan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penyusunan RKPD Kota Batam dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Secara sistematis proses Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dijelaskan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renja



Gambar 1.2
Hubungan Renja Perangkat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen resmi Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kedudukan strategis, terintegrasi serta memiliki keterhubungan secara langsung dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti: Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Renja Perangkat Daerah (PD) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Renja berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan , dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Renja PD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);

9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1159);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, antara lain :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan dan

Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada tahun 2023 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2023, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 15.495.009.211,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.766.905.611,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.414.100.331,-
 - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.352.805.280,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 728.103.600,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebeleur dan komputer.

Selanjutnya pada APBDP Tahun anggaran 2023, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.17.358.034.848,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 17.093.023.848,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.652.604.152,-
 - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.440.419.696,-

Renja Bapelitbangda 2025

2. Belanja Modal sebesar Rp. 265.011.000,-

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD TA. 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan dan pada APBDP TA. 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Hasil pencapaian kinerja Renja dan Renstra Bapelitbangda Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.1/ T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) atau Tahun 2024	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan /n-1 atau Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5,01	URUSAN PERENCANAAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60.00%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60.00%

Renja Bapelitbangda 2025

5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	49 orang/bulan	49 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan	100%	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100.00%
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1980 dok	12 laporan	384 Dokumen	288 Dokumen	100%	-	Dokumen	64.85%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	60.00%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	45 Paket	9 paket	14 Paket	14 Paket	100%	9 paket	32 paket	71.11%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	4 paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	12 Paket
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	80.00%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164 Laporan	102laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	140 Laporan	76.83%
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Paket	2 Paket	2 unit	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 Laporan	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	60.00%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	54 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	34 Laporan	62.96%

Renja Bapelitbangda 2025

5.01.01.2.07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 unit	33.33%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	5 Unit	7 unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	21 Unit	60.00%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	41 Unit	46 Unit	46 Unit	100%	41 unit	133 unit	63.33%
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.00%	96.87%	98.00%	92.97%	94.87%	98.00%	98.00%	100.00%
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	217 BA	43 BA	43 BA	43 BA	100%	44 BA	130 BA	59.91%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	2 BA	4 BA	66.67%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 dokumen	58.33%

Renja Bapelitbangda 2025

5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD yang data dan informasi perencanaan pembangunannya lengkap	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100.00%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	1027 orang	204 orang	220 orang	60 orang	27.27	200 Orang	464 orang	45.18%
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	3 Laporan	8 Laporan	50.00%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	2 Laporan	100.00%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Renja Bapelitbangda 2025

		3. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	15 PD	15 PD	15 PD	15 PD	15 PD	15 PD	100.00%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	319 Dokumen	9 Dokumen	63 Dokumen	54 Dokumen	85.71	63 Dokumen	126 Dokumen	39.50%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198 Dokumen	6 Dokumen	42 Dokumen	36 Dokumen	85.71	42 Dokumen	84 Dokumen	42.42%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	30 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	13 Laporan	21.67%
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 PD	10 PD	10 PD	10 PD	10 PD	10 PD	10 PD	100.00%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD bidang Perekonomian yang telah menyusun dokumen perencanaan	252 Dokumen	10 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	100%	49 Dokumen	129 Dokumen	51.19%

Renja Bapelitbangda 2025

5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	-	-	-
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	18 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	14 Laporan	77.78%
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18 PD	18 PD	18 PD	18 PD	18 PD	18 PD	18 PD	100.00%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	251 Dokumen	18 Dokumen	126 Dokumen	126 Dokumen	126 Dokumen	35 Dokumen	179 Dokumen	71.31%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	100%	-	-	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	51 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	5 Laporan	41 Laporan	80.39%
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	50%	50%	-	-	50%	50%	100.00%
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	2 dokumen	33.33%

Renja Bapelitbangda 2025

		dilaksanakan/difasilitasi								
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	2 Laporan	40.00%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	2 dokumen penelitian/kajian	-	2 dokumen penelitian/kajian	2 dokumen penelitian/kajian	100%	-	2 dokumen penelitian/kajian	100.00%
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	-	1 dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	1 Dokumen
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	-	1 dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	1 Dokumen
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah (IID)	60	-	52	53.61	-	54	54	90.00%
5.05.02.2.04.03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50.00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, Bapelitbangda Kota Batam sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi, Bapelitbangda Kota Batam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bapelitbangda dengan program tingkat Kota Batam menjadi mutlak.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

1. fungsi perencanaan; dan
2. fungsi penelitian dan pengembangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023, Bapelitbangda Kota Batam didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran. Kinerja pelayanan Bapelitbangda Kota Batam yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan fokus pada :

1. perumusan kebijakan
2. bimbingan
3. konsultasi dan koordinasi
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
5. penyusunan kajian/penelitian.

Sesuai dengan kewenangan di atas, secara umum jenis pelayanan berdasarkan output yang diberikan oleh Bapelitbangda terdiri dari:

1. Pelayanan penyusunan dokumen RPJPD
2. Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD
3. Pelayanan penyusunan dokumen RKPD
4. Pelayanan penyusunan dokumen Renstra
5. Pelayanan penyusunan dokumen Renja
6. Pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan
7. Pelayanan kelitbang

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar PD;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;

- 3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
- 4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi perencanaan pembangunan;

Tabel 2.2
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi	Perangkat Daerah
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.	Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

Pengukuran kinerja pelayanan Bapelitbangda dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 2.3/T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja			25	25.05	26	26.5	23.11	-	26	26.5	
2	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan			80%	85%	91%	100%	82,30%	-	91%	100%	
3	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti			50%	50%	50%	50%	50%	-	50%	50%	
4	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			90	91	93	95	90	-	93	95	
5	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			98%	98%	98%	98%	97%	99.03%	98%	98%	
6	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Renja Bapelitbangda 2025

	Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											
9	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief			50%	50%	50%	50%	50%	-	50%	50%	
10	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Capaian Perencanaan Kinerja

Nilai Capaian Perencanaan Kinerja didasarkan pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kemenpan RB yaitu di angka 23.11. Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Namun, belum seluruhnya memenuhi standar yang baik, khususnya di perangkat daerah, yaitu masih adanya sasaran yang tidak menggambarkan pencapaian hasil, indikator kinerja yang belum SMART, kurangnya penyelarasan dan cascading kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis, serta dalam mencapai kinerja belum memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
- b. Perencanaan kinerja belum seutuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, sebagian perangkat daerah fokus pada kinerjanya masing-masing tanpa melihat adanya kolaborasi peran dari perangkat daerah lain, serta masih terjebak pada rutinitas penyerapan anggaran.

2. Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan

Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan dengan rumusan indikator persentase indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan, dari 34 (tiga puluh empat) target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 terealisasi 28 indikator sasaran atau sebesar 82.30%. Sedangkan dari 6 indikator yang tidak tercapai ada 2 (dua) indikator yang capaiannya menunggu penilaian oleh Kementerian/KL yang akan dirilis pada bulan Maret 2024, sehingga data capaian masih menggunakan data tahun 2022 dan untuk 4 (empat) indikator yang tidak tercapai, yaitu :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan
- c. Nilai Tata Kelola Kearsipan PD
- d. Nilai LPPD

3. Persentase *policy brief* yang diimplementasikan / ditindaklanjuti

Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan dengan indikator persentase *policy brief* yang diimplementasikan/ditindaklanjuti dengan target 50%, realisasi 50% atau tercapai.

Policy brief adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

Pada tahun 2023 *policy brief* yang dibuat sebanyak 2 (dua) *policy brief* yaitu terkait kajian Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024-2028 dan fasilitasi evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari dua rekomendasi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan hanya 1 (satu) yaitu evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai masukan terhadap perumusan kebijakan tahun berikutnya, sedangkan kajian Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024-2028 masih termasuk kajian yang tidak bisa langsung diimplementasikan. Pada awal tahun 2024 Pokja PKP Provinsi Kepulauan Riau masih melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disusun karena implementasi pembangunan sanitasi untuk dilaksanakan perlu adanya penerapan konsep perencanaan melalui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terintegrasi dan akan menjadi bagian dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan sanitasi. Sehingga pelaksanaannya belum dapat diimplementasikan.

4. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan

Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target 90%, terealisasi 90%. Dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (sesuai target).

Keberhasilan pencapaian target sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah antara lain didukung oleh:

- a. kualitas disiplin pegawai dalam melaksanakan layanan kesekretariatan
- b. ketersediaan air/listrik dan sarana komunikasi yang baik
- c. pemberian informasi kepegawaian yang tepat waktu
- d. kemudahan pengurusan urusan kepegawaian
- e. terlaksananya sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian
- f. terlaksananya bimtek/diklat intern

g. kepuasan terhadap pembayaran gaji dan TPP

5. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dihitung dengan rumus Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD kali 100% , sehingga dari 216 program RPJMD yang terealisasi di RKPD-P adalah sebanyak 210 program, sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebesar 97%. Dimana, terdapat 6 program RPJMD yang tidak dapat dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 program:

1. Program pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Program Penghargaan LH untuk masyarakat
3. Program Penanganan Pengaduan LH .

Ketiga program tetap dapat dilaksanakan, namun tanpa anggaran.

b. Dinas Perpustakaan dan Arsip terdapat 1 program yaitu: Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, alasannya: karena kebijakan terkait penyelamatan arsip dalam proses penyusunan.

c. Dinas PM PTSP ada 1 program , yaitu Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dimana program ini tetap dilaksanakan namun tanpa anggaran.

d. Disperindag, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dimana program ini tetap dilaksanakan namun tanpa anggaran.

6. Tiga indikator yang dilaksanakan melalui tiga bidang perencana dengan indikator:

- a. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu,
- b. Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu,
- c. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Dapat terealisasi sangat baik atau 100%. Dimana, dalam pencapaian kinerja indikator ini, dilakukan melalui rapat koordinasi, asistensi,

pendampingan dan evaluasi serta pengendalian dokumen perencanaan sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

7. Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti sebagai *policy brief*

Indikator ini terealisasi sesuai target yaitu 50%. Dimana pada tahun 2023 *policy brief* yang dibuat sebanyak 2 (dua) *policy brief* yaitu terkait kajian Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024-2028 dan fasilitasi evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

8. Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah

Penunjang urusan pemerintahan daerah adalah program kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Dimana indikator ini diukur dari lama pelayanan dalam setahun, sehingga capaian kinerjanya tercapai 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bapelitbangda Kota Batam memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan melalui strategi operasional yang diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Sedangkan rumusan kebijakan dalam konteks organisasional Bapelitbangda Kota Batam mengacu pada Renstra Bapelitbangda Kota Batam yang tidak terlepas dari RPJMD Kota Batam. Adapun strategi Bapelitbangda Kota Batam untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bapelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Membangun dan mengembangkan mekanisme perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan sistem evaluasi perencanaan pembangunan (SEPP);

3. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bapelitbangda;
6. Memanfaatkan *database* pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
8. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;
9. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; dan
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda pada kurun periode Renstra 2021-2026, khususnya pada Tahun Anggaran 2023, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif, yang didukung dengan aplikasi SIPD pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Batam, sehingga dapat tercipta konsistensi dan sinkronisasi yang lebih baik antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam;
2. Tersedianya aplikasi evaluasi dokumen perencanaan (SEPP);
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Adapun beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis dikarenakan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan terkadang kurang tersosialisasi secara baik di tingkat daerah, kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur yang mengakibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya pelaksanaan bimtek/workshop penyusunan perencanaan dan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dampak dari capaian kinerja Bapelitbangda terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terlihat pada penghargaan yang diterima Kota Batam dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, sebagai peringkat I di Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam nominasi 10 Kota se-Indonesia yang diikutsertakan dalam penilaian tingkat nasional.

Dalam perkembangan Bapelitbangda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Bapelitbangda melaksanakan 4 (empat) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dari Keempat program tersebut, terdapat perbedaan antara rencana anggaran Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Standar Satuan Harga (SSH). Untuk rincian selanjutnya, review Ranwal RKPD dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Batam

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	373,091,106.58	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100%	327,549,500.00	
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	268,744,246.20			Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100%	267,955,498.00	
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	357,235,243.24			Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100%	355,717,004.00	
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		15 PD	327,549,500.00	

Renja Bapelitbangda 2025

						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	28,912,500.00	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	10,221,000.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9 laporan	4,809,000.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	283,607,000	
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		10 PD	267,955,498	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	72,213,000	

Renja Bapelitbangda 2025

						Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	71,561,998	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prekonomian	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	7 Laporan	63,239,000	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	3 Laporan	60,941,500	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah dievaluasi Dokumen Perencanaannya	Jumlah PD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0		
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		18 PD	355,717,004	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55 (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	101,526,002	

Renja Bapelitbangda 2025

						Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja dan 4 tahapan Renstra)	100,926,002	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah dievaluasi Dokumen Perencanaannya	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	N/A		
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5 Laporan	33,320,000	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	13 Laporan	119,945,000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.00%	1,556,830,589.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		98.00%	2,385,826,000	
						Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	KOTA BATAM	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan		100%	1,888,011,000	
						Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	KOTA BATAM		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 BA	141,476,000	

Renja Bapelitbangda 2025

						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	KOTA BATAM		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	713,730,000	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	KOTA BATAM		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dok RKPD dan 1 dokumen RPJMD	1,032,805,000	
						Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan		100%	163,045,000	
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	163,045,000	
						Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah		100%	334,770,000	
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	KOTA BATAM		Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	208 orang	240,280,000	
						Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten/kota	KOTA BATAM		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	94,490,000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	344,286,268.90	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief		50%	529,995,000.00	

Renja Bapelitbangda 2025

						Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	KOTA BATAM	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi		2 dokumen	10,982,000.00	
						Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	1 laporan	10,982,000.00	
						Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	KOTA BATAM	Indeks inovasi daerah		56	519,013,000.00	
						Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	KOTA BATAM		Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	2 laporan (laporan diseminasi inovasi dan laporan penyusunan Perwako tentang SIDA)	519,013,000.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA BATAM	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15,537,564,702.49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA BATAM	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	16,961,588,500.00	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan		100%	156,888,500.00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA BATAM		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	156,888,500.00	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA BATAM		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		-	

Renja Bapelitbangda 2025

						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	14,500,000,000.00	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA BATAM		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	14,500,000,000.00	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	235,000,000.00	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA BATAM		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	85,000,000.00	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KOTA BATAM		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	150,000,000.00	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KOTA BATAM		Jumlah Orang Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 orang		
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	754,000,000.00	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA BATAM		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	39,000,000.00	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA BATAM		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	100,000,000.00	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA BATAM		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	65,000,000.00	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA BATAM		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50,000,000.00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA BATAM		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	500,000,000.00	

Renja Bapelitbangda 2025

						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	50,000,000.00	
						Pengadaan Mebel			Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 unit	50,000,000.00	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	162,500,000.00	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	62,500,000.00	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000.00	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	1,103,200,000.00	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,000,000.00	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	357,200,000.00	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	34,000,000.00	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	672,000,000.00	

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberi usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu usulan Perencanaan Pembangunan juga berasal dari Kunjungan Kerja Walikota Batam dan melalui Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Batam yang telah diterima akan dilakukan penginputan melalui SIPD oleh pihak Kelurahan/Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Usulan tersebut akan diteruskan ke PD terkait untuk dilakukan penyusunan Renja PD tersebut. Namun untuk program/kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bapelitbangda, tidak terdapat usulan yang berasal dari masyarakat.

Tabel 2.5 / Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Bapelitbangda Kota Batam

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional menurut Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 adalah : “Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Berdaulat, maju dan Berkelanjutan”. Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) sasaran visi yaitu :

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat;
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Zero Emission.

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik 2025-2029 adalah:

1. Transformasi Sosial, yaitu: pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Transformasi Ekonomi, yaitu hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Transformasi Tata Kelola, yaitu: kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, yaitu: memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yaitu: memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sesuai tugas pokok Bapelitbangda sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya, maka merupakan tugas wajib Bapelitbangda untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama Visi Kota Batam tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.”

Berdasarkan visi tersebut, maka Bapelitbangda Kota Batam mendukung Misi 5, yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bapelitbangda Kota Batam mengidentifikasi tujuan Renstra, yang kemudian menjadi tujuan Renja Bapelitbangda yaitu: **“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas”**, dengan indikator: Nilai Capaian Perencanaan Kinerja

Berdasarkan tujuan Renstra di atas, Bapelitbangda memiliki 3 (tiga) sasaran Renstra, yang kemudian menjadi sasaran Renja sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, dengan indikator: Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan.
- 2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan, dengan indikator: Persentase *policy brief* yang diimplementasikan/ ditindaklanjuti.
- 3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator: Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1.	TUJUAN: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	26
2.	SASARAN I: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	91%
3.	SASARAN II: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%
4.	SASARAN III: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	93

3.3 Program dan Kegiatan

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda merupakan badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi: fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut, Bapelitbangda memiliki 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun lokasi kegiatan berada di Kota Batam. Untuk melaksanakan 4 (empat) program dimaksud, pada tahun 2025 dibutuhkan anggaran kurang lebih sebesar 19.822.702.553,00,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dan tidak terdapat perbedaan antara program yang terdapat pada Ranwal RKPD dengan Renja Bapelitbangda.

Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

I.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

I.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel

I.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Bangunan lainnya
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

II.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

II.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
2. Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten/Kota

II.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

III.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

III.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

III.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

IV.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

IV.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 3.2 /T-C.33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025,
Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

No.	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH				19.822.702.553,00			16.487.757.765,61	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.822.702.553,00				16.487.757.765,61
	5	1				PERENCANAAN				19.536.112.553,00				16.363.902.832,62
1	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	16.832.937.553,00				13.424.704.501,00
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan		100%	128.712.000,00				138.716.356,00
	5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	128.712.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	138.716.356,00

Renja Bapelitbangda 2025

	5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	12.828.479.017,00		-	100%	10.753.143.903,00
	5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	60 Orang/bulan	12.828.479.017,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	55 Orang/bulan	10.753.143.903,00
	5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	119.448.000,00		-	100%	200.034.501,00
	5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Paket	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	56 Paket	100.034.501,00
	5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	56 Orang	119.448.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	56 Orang	100.000.000,00
	5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.593.527.000,00		-	100%	1.780.112.099,00
	5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Paket	15.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	271.226.023,00
	5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Paket	786.705.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9 Paket	647.603.793,00
	5	1	1	2.06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Paket	64.911.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Paket	71.647.979,00
	5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Paket	96.630.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	289.634.304,00
	5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Laporan	629.656.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	130 Laporan	500.000.000,00
	5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	1.052.176.000,00		-	100%	225.083.200,00
	5	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	634.886.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	375.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Paket	41.565.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Paket	225.083.200,00
	5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	85.483.536,00		-	100%	78.940.442,00
	5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Laporan	1.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	78.940.442,00
	5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	83.863.536,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	11 Laporan	0,00

Renja Bapelitbangda 2025

	5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	1.025.112.000,00		-	100%	248.674.000,00
	5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	44.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	50.000.000,00
	5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Unit	173.818.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7 Unit	157.449.000,00
	5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	41 Unit	44.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	42 Unit	41.225.000,00
	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Unit	762.384.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
2	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		95%	2.557.708.000,00			95%	1.704.892.465,00

Renja Bapelitbangda 2025

	5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang selaras		2 Dokumen	1.763.775.000,00		-	100%	1.382.092.389,00
	5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	86 Berita Acara	141.476.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	45 Berita Acara	151.499.680,00
	5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Berita Acara	916.813.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Berita Acara	494.077.709,00
	5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	705.486.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	736.515.000,00
	5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah		100%	606.236.000,00		-	100%	137.706.663,00
	5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	208 Orang	511.596.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	208 Orang	37.706.663,00

Renja Bapelitbangda 2025

	5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Buku	94.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00
	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100%	187.697.000,00		-	100%	185.093.413,00
	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Laporan	187.697.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	185.093.413,00
3	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan ikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	145.467.000,00			100%	1.234.305.866,62
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu							

Renja Bapelitbangda 2025

							Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu							
	5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		15 PD	86.467.000,00		-	15Perangkat Daerah	569.696.594,00
	5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	120 Dokumen	21.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	63 Dokumen	48.052.449,00
	5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	2.157.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Laporan	182.316.098,00
	5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	66 Dokumen	6.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	42 Dokumen	87.739.584,00
	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 Laporan	55.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9 Laporan	251.588.463,00
	5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		10 PD	28.016.000,00		-	10 Perangkat Daerah	193.691.919,62
	5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	77 Dokumen	5.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	49 Dokumen	62.000.000
	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Laporan	6.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7 Laporan	99.135.181,00
	5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	33 Dokumen	8.976.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	21 Dokumen	20.000.000,00
	5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Laporan	6.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	74.556.738,00
	5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		18 PD	30.984.000,00		-	18 Perangkat Daerah	470.917.353,00
	5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	55 Dokumen	10.323.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	35 Dokumen	155.605.572,00
	5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	5 Laporan	6.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Laporan	140.315.128,00
	5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	143 Dokumen	6.996.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	91 Dokumen	90.287.097,00
	5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	13 Laporan	7.415.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	13 Laporan	84.709.556,00
	5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				286.590.000,00				123.854.932,99
4	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief		50%	286.590.000,00			50%	123.854.932,99
	5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi		1 Dokumen	6.915.000,00		-	1Dokumen	4.696.792,51
	5	5	2	2.01	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	6.915.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	4.696.792,51
	5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	indeks inovasi daerah		56	279.675.000,00		-	60	119.158.140,48
	5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Laporan	279.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		119.158.140,48
	J U M L A H									19.822.702.553,00				16.487.757.765,61

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapelitbangda Kota Batam, akan dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025,dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Bapelitbangda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra PD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif (Rp)
									Target 2025	
1	2					3	4	5	8	9
						BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH				19.822.702.553,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.822.702.553,00
	5	01				PERENCANAAN				19.536.112.553,00

Renja Bapelitbangda 2025

1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	16.832.937.553,00
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100%	128.712.000,00
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	128.712.000,00
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	12.828.479.017,00
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	12.828.479.017,00
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	119.448.000,00
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	168 Orang	56 Orang	119.448.000,00
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.593.527.000,00

Renja Bapelitbangda 2025

5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	15.625.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	7 Paket	786.705.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	64.911.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	96.630.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	598 Laporan	12 Laporan	629.656.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.052.176.000,00
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

Renja Bapelitbangda 2025

						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	375.725.000,00	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	41.565.000,00	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100%	85.483.536,00
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	1.620.000,00	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	55 Laporan	12 Laporan	83.863.536,00	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	100 %	1.025.112.000,00
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

Renja Bapelitbangda 2025

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.640.000,00	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	7 Unit	173.818.000,00	
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	41 Unit	44.270.000,00	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	762.384.000,00	
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %	2.557.708.000,00
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100%	1.763.775.000,00
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	217 Berita Acara	43 Berita Acara	141.476.000,00	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	2 Berita Acara	916.813.000,00	

Renja Bapelitbangda 2025

	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	2 Dokumen	705.486.000,00
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	100 %	100%	606.236.000,00
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1027 Orang	208 Orang	511.596.000,00
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	94.640.000,00
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100 %	100%	187.697.000,00
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	2 Laporan	187.697.000,00

Renja Bapelitbangda 2025

3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	145.467.000,00
							Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	
							Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	15 PD	86.467.000,00
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	306 Dokumen	120 Dokumen	21.910.000,00

Renja Bapelitbangda 2025

5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 Laporan	1 Laporan	2.157.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	204 Dokumen	66 Dokumen	6.600.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	27 Laporan	6 Laporan	55.800.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 PD	10 PD	28.016.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	231 Dokumen	77 Dokumen	5.600.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				

Renja Bapelitbangda 2025

						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	38 Laporan	7 Laporan	6.840.000,00	
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	75 Dokumen	33 Dokumen	8.976.000,00	
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	9 Laporan	3 Laporan	6.600.000,00	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18 PD	18 PD	30.984.000,00
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	195 Dokumen	55 Dokumen	10.323.000,00	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	30 Laporan	5 Laporan	6.250.000,00
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	325 Dokumen	143 Dokumen	6.996.000,00
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	39 Laporan	13 Laporan	7.415.000,00
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				286.590.000,00
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50 %	50 %	286.590.000,00
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi	5 Dokumen	1 Dokumen	6.915.000,00
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				

Renja Bapelitbangda 2025

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5 Laporan	1 Laporan	6.915.000,00
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	indeks inovasi daerah	60 indeks	56 indeks	279.675.000,00
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	6 Laporan	2 Laporan	279.675.000,00
	J U M L A H									19.822.702.553,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan serta pengembangan berbagai potensi yang ada di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam. Selanjutnya, secara langsung dapat mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2025 adalah:

- a. Renja Bapelitbangda Tahun 2025 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2025 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Monitoring,

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI